

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan ialah pemberlakuan otonomi pendidikan yang disertai adanya kreasi ataupun inovasi dalam berbagai unsur institusi kependidikan, seperti kreatifitas ataupun inovasi pada manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah atau madrasah.

Pembiayaan pendidikan adalah komponen yang terpenting pada peningkatan kualitas lembaga pendidikan, hal tersebut dikarenakan seluruh aktivitas manajemen pembiayaan pendidikan tentunya membutuhkan biaya. Jika tidak ada biaya, kegiatan belajar juga tidak bisa terlaksana secara efektif. “Pembiayaan dan Keuangan adalah salah satu bagian yang menjadi bagian produksi pada penentuan aktivitas-aktivitas belajar bersama bagian lainnya.¹

Alokasikan dana sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pendidikan tidak senantiasa membuat madrasah swasta lebih baik. Bahkan Kebijakan pendidikan yang menggratiskan biaya menjadikan madrasah swasta dalam sulit melakukan perkembangan, BOS (Bantuan Operasional Siswa) yang merupakan landasan kebijakan pendidikan gratis dalam praktiknya cenderung harus digunakan pada biaya operasional pendidikan yang memiliki tujuan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan peserta didik, sedangkan permasalahan yang

¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 47.

mendasar pada madrasah swasta, yakni insentif guru berupa honor dan gaji yang tidak dipikirkan. Adanya desentralisasi pendidikan melalui penyerahan dan binaan sekolah kepada Pemda sudah mengakibatkan pengkutuban ataupun polarisasi terhadap madrasah dan sekolah. Akibat yang sangat menonjol yaitu terdapat tingkat kesejahteraan yang berbeda terhadap guru madrasah dan guru sekolah. Pada guru yang dibawah diknas ada tunjangan daerah sedangkan guru yang dibawah kemenag tidak ada, sebagaimana hasil penelitian Muhammad Murtadlo (puslitbang pendidikan Agama dan Keagamaan) dalam penelitiannya tentang strategi pembiayaan terhadap madrasah swasta unggulan. Kebijakan tersebut juga mengesankan adanya perbedaan perlakuan pemerintah daerah terhadap sekolah dengan madrasah. Pada sebuah pandangan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 No 20 memaknai seluruh aktivitas penyelenggaran pendidikan diharuskan melaksanakan desentralisasi, tapi pada sisi lainnya Undang-undang Pemerintahan Daerah Tahun 1999 No. 22 menyebutkan bidang agama bukan merupakan bidang yang didesentralisasi (lembaga vertikal).² Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah tidak bersedia memberikan bantuan pembiayaan berupa apa saja pada instansi yang dinilai vertikal, contohnya madrasah pada Kemenag. Pandangan pemerintah daerah yang demikian sesungguhnya tidak dapat diterima golongan praktisi madrasah. Meskipun tidak melakukan apapun terhadap tindakan diskriminatif wilayah tersebut. Kalangan praktisi madrasah menilai kedua pihak memang menyelenggarakan pendidikan formal, melaksanakan UN

² Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) Nomor 22 tahun 1999, (Jakarta: Tira Smart, 2017).

sebagaimana halnya sekolah bisa, dan membimbing siswa-siswi Indonesia. Dengan demikian, tindakan yang memberlakukan perbedaan tertentu pada sekolah umum dan madrasah dirasakan merupakan tindakan diskriminasi pada madrasah, apalagi madrasah secara dominan didirikan dari lembaga pendidikan swasta.

Pembiayaan pendidikan adalah bagian *instrument input* (masukan instrumental) terpenting untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia dengan menyelenggarakan pendidikan di madrasah ataupun sekolah. Nyaris tidak ada upaya dari pendidikan yang bisa diabaikan dari peran pembiayaan, sehingga apabila tidak ada biaya dapat berakibat pada terhambatnya proses pelaksanaan pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan di madrasah tersebut juga tidak terlepas dari banyaknya masalah pembiayaan, sebagaimana madrasah lainnya secara umum. Masalah tersebut berkisar di tingkat produktivitas biaya yang dipakai, efektivitas, efisiensi, alokasi, sumber-sumber, penyediaan dan modal dasar.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Cheng, sekolah dinyatakan berhasil apabila memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan tercapainya fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan sekolah. Walaupun tidak secara penuh persoalan biaya dapat memiliki pengaruh langsung pada kualitas sekolah, terlebih yang berhubungan terhadap infrastruktur belajar. Pada hubungan tersebut, walaupun tuntutan reformasi ialah pendidikan yang berkualitas dan murah, tapi dengan adanya pendidikan tersebut tentunya membutuhkan biaya.³

Pembiayaan pendidikan yang diberikan keluarga (orang tua), pemerintah, dan masyarakat dalam membentuk pendidikan untuk anak harus dipandang sebagai investasi. Uang yang diberikan di bidang pendidikan merupakan wujud berinvestasi

³Cheng, *Manajemen Sekolah Efektif Dan Unggul*, [https://ilmucerdaspendidikan.wordpress.com/2011/04/27/157/#:~:text=Cheng%20\(1996\)%20mendefinisikan%20sekolah%20efektif,fungsi%20budaya%20maupun%20fungsi%20pendidikan.](https://ilmucerdaspendidikan.wordpress.com/2011/04/27/157/#:~:text=Cheng%20(1996)%20mendefinisikan%20sekolah%20efektif,fungsi%20budaya%20maupun%20fungsi%20pendidikan.) (23 Maret 2021).

dalam suatu periode, pada waktu mendatang dapat dihasilkan manfaat dan keuntungan langsung pada kualitas sekolah, khususnya yang berhubungan terhadap infrastruktur. Tidak sedikit sekolah yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan cara maksimal dikarenakan permasalahan biaya, yakni dalam menyediakan fasilitas belajar ataupun memberi gaji untuk gurunya. Berdasarkan hal tersebut, tuntutan reformasi yakni pendidikan yang berkualitas dan murah dimana hal itu tentunya membutuhkan biaya yang besar.⁴

Manajemen pembiayaan adalah suatu tahapan untuk memaksimalkan anggaran yang diberikan, mendistribusikan anggaran sebagai fasilitas pendukung kegiatan belajar, sehingga dapat terbentuk kegiatan belajar secara efisien dan efektif. Dengan demikian, pada hal tersebut fokusnya ialah bagaimana potensi yang tersedia dapat diolah dengan efektif, sehingga dapat menjadikan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan terpenuhi.

Pembiayaan pendidikan sering dianggap sebagai permasalahan yang besar dalam mendukung madrasah swasta untuk menjadi sekolah yang unggul. Penelitian ini akan melakukan kajian terhadap kreatifitas manajemen pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan madrasah yang terpinggirkan. Pengkajian itu didasari oleh studi kasus pada madrasah marjinal di kota Banjarmasin sehingga memperoleh model pembiayaan pendidikan yang dapat membuat madrasah tersebut mampu bertahan dan tetap eksis, ditengah biaya tinggi dalam pengelolaan, sementara kebanyakan input siswa berlatar belakang orangtua yang mempunyai kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Sedangkanuntutannya setiap anak berhak mendapatkan

⁴ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 193.

pendidikan yang bermutu. Untuk tercapainya pendidikan yang bermutu dibutuhkan terdapatnya partisipasi dan dukungan terhadap seluruh pihaknya, terutama yang berkaitan terhadap biaya pendidikan.

Pertanggungjawaban biaya pendidikan dan pengadaan biaya pendidikan sudah dibahas pada kebijakan undang-undang yang ada. Pada Undang-undang Tahun 2003 Nomor 20 bab XIII pasal 46 ayat 1 mengenai tanggung jawab pembiayaan dinyatakan: biaya pendidikan adalah pertanggungjawaban secara kolektif terhadap masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kemudian pada pasal 47 ayat 1 dan 2 mengenai sumber biaya pendidikan dikatakan: Sumber biaya pendidikan ditetapkan sesuai prinsip berkelanjutan, keadilan dan kecukupan. Masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah mengelola potensi yang tersedia berdasarkan kebijakan undang-undang yang ada.

Hingga sekarang, pembiayaan yang bersumber dari pemerintah cenderung memiliki keterbatasan pada jumlah, terutama lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat yakni lembaga pendidikan madrasah dengan status swasta dan dikelola oleh yayasan yang boleh dikatakan “Bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau”.

Di Kota Banjarmasin jenis madrasah yang seperti ungkapan diatas banyak, walaupun semua madrasah baik di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), maupun Madrasah Aliyah (MA) swasta dipersyaratkan harus berbadan hukum atau berbentuk sebuah yayasan resmi yang lengkap dengan struktur personalnya, tetapi pada kenyataannya seluruh kebijakan terkait operasional madrasah diserahkan kepada kepala madrasah dan guru

sedangkan yayasan tidak berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan operasional madrasah. Di sisi lain, hasil studi pendahuluan oleh peneliti di beberapa madrasah, juga mengungkapkan bahwa ada sebagian kecil madrasah yang yayasannya terlibat atau berpartisipasi dalam hal pengelolaan madrasah, seperti pada lembaga yang dikelola oleh lembaga Muhammadiyah dimana yayasan juga aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan dan program-program yang diterapkan pada madrasah bersangkutan. Hal ini menjadi bukti bahwa pihak yayasan punya andil dalam pengelolaan dan operasional madrasah, sehingga kepala madrasah sangat terbantu termasuk dalam hal mengelola pembiayaan pendidikan di madrasah tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Bidang Pendidikan Madrasah, untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdapat 63 madrasah, sebanyak 5 madrasah yang berstatus Negeri (MIN) dan 58 madrasah yang berstatus swasta atau MIS.

Melihat realitas yang ada di masyarakat terhadap pendidikan di madrasah marjinal di kota Banjarmasin, untuk dapat tetap hidup dan berlangsungnya proses belajar mengajar serta persaingan dalam merebut hati masyarakat untuk dapat mempercayakan anaknya untuk dididik di madrasah tersebut sangat perlu dimiliki oleh seorang kepala madrasah yang ditugasi untuk memimpin madrasah tersebut, yaitu kreatifitas manajemen pembiayaan pada madrasah. Kalau tidak ingin madrasah yang dikelolanya gulung tikar atau tidak dapat beroperasi lagi dikarenakan besarnya biaya operasional madrasah dibandingkan dengan pendapatan biaya yang sangat minim. Hal tersebut pulalah yang melatar belakangi

banyak madrasah yang tadinya berstatus swasta harus dinegerikan dikarenakan banyak lembaga atau yayasanya tidak mampu lagi untuk mengelola sumber pembiayaan pada madrasah tersebut.

Pembiayaan adalah bagian terpenting sebagai penentu dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas pada kegiatan belajar disertai komponen lainnya. Pembiayaan pendidikan adalah komponen untuk lembaga pendidikan contohnya sekolah, baik yang diurus pemerintah (sekolah negeri) dan diurus masyarakat sendiri (sekolah swasta) dengan diatur lembaga pelaksana pendidikan ataupun yayasan. Pembiayaan-pembiayaan yang digunakan wajib tercatat dan dikelola secara efektif, sehingga pendidikan itu bisa diefektifkan dan diefisienkan pada proses belajar. Biaya pendidikan yang terstruktur secara tepat dapat memaksimalkan pelayanan pendidikan untuk konsumen pihak internal contohnya pegawai, staff, peserta didik dan yang terkait dan pelanggan eksternal contohnya pemerintah, masyarakat dan orang tua. Tapi kebalikannya jika biaya pendidikan tidak terstruktur secara tepat, dengan demikian seluruh program-program dan jenis pelayanan pendidikan di sekolah tidak dapat terlaksana secara efektif dan tidak dapat memperoleh kualitas yang dikehendaki.

Harsono menyebutkan pembiayaan pendidikan bisa dikelompokkan ke dalam empat macam, yakni: Dana yang diperoleh berdasarkan perusahaan dan sponsor, dana yang diperoleh berdasarkan badan pendidikan tersebut sendiri, dana yang diperoleh berdasarkan pemerintah, dan dana yang diperoleh berdasarkan orang tua peserta didik/ masyarakat.

Komponen-komponen pembiayaan pendidikan terutama di madrasah selayaknya dikelola secara efektif, diatur, direncanakan kemudian digunakan sesuai kebutuhan dan target. Realita yang terjadi yakni banyak lembaga pendidikan madrasah swasta yang marjinal hingga sekarang tetap mengimplementasikan bentuk-bentuk manajemen yang ada pada pengelolaan biaya.

Sehubungan dengan hal ini, terdapat jenis tarik-ulur terhadap pemerataan pendidikan dan pengembangan kualitas pendidikan. Sesuai dengan pernyataan tersebut, pemerintah sangat membutuhkan perspektif secara mendetail dalam memperoleh solusi yang hendak dilalui sebagai perwujudan upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari dorongan anggaran, sebab dalam mengembangkan kualitas juga wajib meningkatkan kegiatan belajar di dalam kelas, kemudian kegiatan belajar tersebut bisa dinyatakan berkualitas apabila terdapat pembiayaan tinggi secara terstruktur. Pengukuran alokasi biaya pendidikan wajib dilaksanakan dengan akurat dan selaras terhadap biaya satuan dan bagian aktivitas pendidikan, jika telah dilaksanakan, dengan demikian dilakukan seluruh pemakaian dana pendidikan merupakan hal yang harus dilaksanakan.

Secara umum, manajemen pembiayaan pendidikan bertujuan dalam mewujudkan kualitas pendidikan seperti yang diinginkan. Dalam tiap-tiap tahap manajemen pembiayaan, yang menjadi fokusnya yakni mencapai misi dan visi sekolah. Proses tersebut meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan pengawasan.

Kreatifitas manajemen pembiayaan pada madrasah sangat mutlak diperlukan oleh seorang kepala madrasah pada madrasah marjinal atau

terpinggirkan, karena hal itulah yang menjadi alasan bagi keberlangsungan proses pendidikan dan tetap berjalan serta bersaing dengan lembaga pendidikan negeri dan swasta yang sudah cukup mapan.

Terjadinya kesenjangan pada aspek pembiayaan inilah juga yang menyebabkan adanya perbedaan mutu atau kualitas suatu madrasah, yang terlihat jelas dari fisik bangunannya, kesejahteraan para pendidiknya hingga kualitas lulusannya .

Sedangkan pada penelitian Firdaus menyebutkan sistem pendanaan secara tepat bisa mencapai pendidikan yang berkualitas dan memberi jaminan terhadap kelangsungan kehidupan badan pendidikan swasta. Sumber biaya yang bersumber dari siswa menjadi potensi yang besar untuk menjalankan manajemen pendidikan.⁵

Hal ini juga diperkuat dalam UU RI Tahun 2003 No. 20 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Bab XV pasal 54 ayat 1 dan 2

Partisipasi warga pada pendidikan mencakup partisipasi organisasi masyarakat, pengusaha, organisasi profesi, berkelompok, dan individual untuk menyelenggarakan dan mengendalikan kualitas layanan pendidikan. Warga bisa menjalankan peran salu pengguna, sumber, dan pelaksana pendidikan.⁶

Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka kepala madrasah berhak melakukan inovasi dan berkreasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan dan pendayagunaan dana yang ada untuk meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu. Serta meningkatkan peran serta masyarakat untuk terlibat dan dilibatkan secara langsung dalam mengelola pendidikan khususnya pada madrasah swasta

⁵ Rahman Firdaus, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan mutu Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Swasta (Studi Kasus di Lembaga Pendidikan Bahasa Asing, LIA, MMC, ELS dan Cinderella di Bandung Tahun 2002 - 2003)"(Tesis tidak diterbitkan, Tesis S2 PPS UPI Bandung, 2004), h. 123.

⁶ Undang-Undang Sisdiknas dan PP No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan, (Jakarta: Permata press), h.29.

pendidikannya marjinal, yakni pada perspektif yang berhubungan terhadap partisipasi secara fisik material dan kebijakan madrasah. Dengan demikian, tentu dibutuhkan manajemen ataupun pengelolaan yang diperoleh dari orang tua peserta didik dan masyarakat dengan cara transparan dan terbuka. Pada pengelolaan tersebut ada serangkaian kegiatan yang mencakup hal dalam merencanakan program sekolah, mengestimasi dana, membelanjakan anggarannya, mengawasi dan memberi laporan biayannya.

Mengingat perlunya peranan pembiayaan pada kegiatan belajar, dengan demikian tidak bisa dihindari penataan kelola biaya secara efektif pada anggaran pendidikan. Penataan kelola tersebut berikutnya dinamakan manajemen pembiayaan. Berkaitan terhadap hal itu, tidak sedikit permasalahan yang timbul, yakni: (1) Rendahnya alokasi dana pendidikan bagi madrasah swasta, (2) penyelewengan pada penyalurannya, dan (3) anggaran tidak mencukupi.

Berangkat dari realita yang terjadi, peneliti termotivasi melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan Kreatifitas Manajemen Pembiayaan pada Madrasah Marjinal di Kota Banjarmasin. Tentunya dengan suatu harapan supaya hasilnya bisa dijadikan sebuah sumber inspirasi bagi para kepala madrasah swasta dan termarjinalkan untuk dapat bertahan dalam mengelola dan meningkatkan mutu pada madrasahnyanya masing masing.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar masalah diatas, maka fokus permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan manajemen pembiayaan pada MI Darul Huda dan MI Al Istiqamah?
2. Bagaimana pemanfaatan sumber dana pada MI Darul Huda dan MI Al Istiqamah?
3. Bagaimana efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana pendidikan pada MI Darul Huda dan MI Al Istiqamah?
4. Bagaimana partisipasi stakeholder madrasah terhadap pembiayaan pada MI Darul Huda dan MI Al Istiqamah?
5. Bagaimana akuntabilitas pembiayaan pendidikan pada MI Darul Huda dan MI Al Istiqamah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui bagaimana perencanaan manajemen pembiayaan pada MI Darul Huda dan MI Al Istiqamah.
2. Mengetahui bagaimana pemanfaatan sumber dana pendidikan pada MI Darul Huda dan MI Al Istiqamah.
3. Mengetahui bagaimana efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana pendidikan pada MI Darul Huda dan MI Al Istiqamah.
4. Mengetahui bagaimana partisipasi stakeholder madrasah terhadap pembiayaan pada MI Darul Huda dan MI Al Istiqamah

5. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pembiayaan pendidikan pada MI Darul Huda dan MI Al Istiqamah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat mengembangkan ilmu administrasi/ manajemen pendidikan, khususnya tentang bagaimana pihak madrasah berkeaktifitas untuk mencari, menggali sumber dana untuk mengelola madrasah agar tetap eksis.
- b. Hasil penelitian ini menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bisa memberi manfaat bagi pemangku kepentingan di madrasah yang terpinggirkan di Kota Banjarmasin, antara lain :

a. Bagi guru Madrasah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi gambaran umum mengenai kreatifitas manajemen madrasah dan sekolah yang diharapkan menjadi pemicu untuk lebih meningkatkan kinerja guru yang tentu akan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dan prestasi madrasah.

b. Bagi kepala Madrasah

Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan kreatifitas manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah, serta pembinaan kepada para guru untuk meningkatkan kinerja di madrasah .

c. Bagi Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Dapat menjadi masukan yang berguna dalam pembinaan madrasah di wilayahnya, serta untuk menentukan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Madrasah di Kota Banjarmasin.

E. Definisi Istilah

Pada penelitian ini, pengertian istilah yaitu menyamakan persepsi tentang pengertian/ konsep penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kreatifitas

Kreativitas merupakan kemampuan dalam membuat suatu hal baru dengan memberikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan permasalahan ataupun sebagai kecakapan dalam mengetahui korelasi-korelasi baru terhadap aspek-aspek yang telah ada sebelumnya.

2. Manajemen Pembiayaan.

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan terhadap tata kelola tanggung jawab dan sumber pemakaian anggaran untuk pendidikan pada badan pendidikan ataupun di sekolah. Aktivitas yang terdapat pada manajemen pembiayaan pendidikan mencakup 3 unsur, yaitu:

budgeting (penyusunan anggaran), *accounting* (pembukuan), dan *controlling* (pemeriksaan).

3. Madrasah Marjinal

Madrasah marginal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah madrasah yang mengalami kesulitan dari aspek pembiayaan, selain itu ditinjau dari beberapa aspek:

- a. Dari aspek geografis, madrasah tersebut berada di daerah pinggiran kota .
- b. Dari aspek demografis, madrasah tersebut berada d daerah padat penduduk
- c. Dari aspek ekonomis, madrasah tersebut berafdda pada daerah miskin perkotaan
- d. Dari aspek birokrasi, madrasah tersebut kurang mendapat perhatian , bantuan

F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran peneliti di berbagai sumber, menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan terhadap penelitian ini.

1. Ulpha Lisni Azhari, meneliti tentang manajemen pembiayaan pendidikan, infrasturktur pembelajaran, dan kualitas sekolah. Penelitiannya fokus terhadap pengkajian seperti apa pengaruh fasilitas pembelajaran dan manajemen pembiayaan pendidikan pada kualitas sekolah. Hal tersebut bertujuan memberikan deskripsi dan menganalisa pengaruh fasilitas pembelajaran dan manajemen pembiayaan pendidikan pada kualitas sekolah.

2. Zuardi Atmadinata (2021) dengan judul penelitian Kreativitas manajemen peningkatan kinerja madrasah pada madrasah ibtidaiyah swasta pinggiran kota Banjarmasin, hasil penelitiannya menjelaskan kreativitas manajemen berpengaruh dan berkorelasi terhadap peningkatan kinerja *fundraising* pada madrasah ibtidaiyah swasta pinggiran.
3. Noor Jennah (2014) dengan judul penelitian Pengelolaan pembiayaan pendidikan di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (studi Kasus pada jenjang Pendidikan Tingkat Menengah). Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana manajemen biaya pendidikan meliputi: (a) proses menyusun anggaran, (b) pemakaian, dan (c) tanggung jawab biaya pendidikan di SMA Hasbunallah Tabalong, SMKN 1 Tanjung, SMA Negeri 1 Tanjung, dan MAN 1 Tanjung yang terdapat pada kec. Murung Pudak Kab. Tabalong. Hasilnya memperlihatkan: (a) anggaran biaya pendidikan berdasarkan 4 sekolah yang diamati diawali dari susunan RAKS/RAKM (Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah/ Madrasah) yang dilaksanakan di setiap tahunnya. Empat sekolah tersebut menggunakan pembiayaan paling banyak yakni guna memberikan gaji pegawainya dan paling sedikit yakni meningkatkan kecakapan gurunya. (b) anggaran yang diberi yayasan ataupun pemerintah dikirimkan pada rekening madrasah dan sekolah, berikutnya anggaran yang sudah didapatkan itu dipakai dalam menyelenggarakan kegiatan ataupun program yang terdapat pada RAKS/RAKM; (c) Empat sekolah bertanggungjawab terhadap semua pemakaian biaya pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong ataupun pendidikan kepada pemerintah pusat.

4. Eddy Khairani Z (2012) dengan judul penelitian Strategi kepala madrasah dalam pelaksanaan manajemen keuangan di MTsN 1 Rantau dan MTsN 2 Rantau Kab Tapin. Hasilnya memperlihatkan penyelenggaraan pengelolaan pembiayaan MTsN 2 Rantau dan MTsN 1 Rantau telah terlaksanakan secara efektif walaupun terdapat sejumlah hal pengelolaan yang tidak begitu efektif, contoh pembukuan keuangan. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan adanya perbedaan dalam mengelola pembiayaan di dua sekolah itu, yaitu beban kerja, Sumber Daya Manusia dan pembiayaan.
5. Siti Fatimatuzzuhro (2010) dengan judul penelitian Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan di SD Iskandar Said Surabaya. Hasilnya memperlihatkan manajemen pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah pada SD Iskandar Said Surabaya terlaksana secara baik, dikarenakan hal-hal yang berorientasi terhadap terwujudnya visi pendidikan yang ditentukan SD tersebut tidak sedikit yang belum terwujud. Dimulai dengan prestasi non akademik dan prestasi akademik peserta didik, menambah fasilitas, melibatkan pengajar terhadap pelatihan pendidikan, dan biayanya gratis. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengembangkan kualitas pendidikan yang terdapat pada Sekolah Dasar Iskandar Said. Terdapat sejumlah masalah di sekolah mengenai manajemen pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah, mencakup: (a) Aspek keuangan, terlihat saat Bantuan Operasional Sekolah pada pencairan dananya kadang-kadang sangat lambat, (b) Aspek human, dikarenakan pada bentuk teknis diperlukan perhatian dan kehati-hatian yang tidak sama seperti sebelum terdapat biaya Bantuan

Operasional Sekolah, dengan demikian untuk mengelolannya diperlukan ketenagakerjaan baru. (c) Aspek fasilitas, terdapatnya sejumlah fasilitas di sekolah yang ditambahkan. (d) Aspek tahap pembelajaran, pada dasarnya tahap pembelajaran pada Sekolah Dasar Iskandar Said tersebut bisa terlaksana secara efektif.

Yang menjadi pembeda penelitian terdahulu dan penelitian ini ialah terdapat di kreativitas manajemen pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan oleh kepala madrasah dalam mengelola lembaga pendidikan swasta di kota Banjarmasin, mulai dari dari perencanaan, penggunaan, pengalokasian, pendokumentasian, pelaporan dan pertanggungjawaban.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun kedalam enam (6) Bab, sebagaimana berikut ini:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang permasalahan, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teoritis, yang memuat tinjauan teoritis terkait masalah yang hendak menjadi fokus yang diteliti, yakni memuat berisi teori tentang manajemen dan pembiayaan pendidikan. Selain berisi teori-teori Bab ini juga berisi kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan data berisi tentang paparan data penelitian pada MI Darul Huda Kota Banjarmasin dan MI Al Istiqamah Kota Banjarmasin.

Bab V Pembahasan berisi data dan analisis data berdasarkan sub fokus penelitian.

Bab VI Penutup, berisi simpulan dan saran.